



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 494 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN

KALURAHAN KALURAHAN TRIMURTI DAN KALURAHAN PONCOSARI

KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PERIODE TAHUN 2024-2030

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa telah dilakukan pemilihan anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan Periode Tahun 2024-2030 di Kalurahan Trimurti dan Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan secara demokratis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan, peresmian pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan Kalurahan Trimurti dan Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TRIMURTI DAN KALURAHAN PONCOSARI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030.

- KESATU : Meresmikan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Trimurti dan Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2024.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 4 Desember 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Srandakan;
6. Lurah Trimurti;
7. Lurah Poncosari; dan
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 494 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN  
TRIMURTI DAN KALURAHAN PONCOSARI  
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2024-2030.

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN  
TRIMURTI DAN KALURAHAN PONCOSARI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN  
BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030

A. KALURAHAN TRIMURTI

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Meitia Dwi Silfiani Bantul, 15 Mei 1989	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Heru Purwanto Bantul, 26 Januari 1966	Laki-laki	Wilayah I (Srandakan dan Gerso)
3.	Muslihan Amna Bantul, 22 November 1982	Laki-laki	Wilayah II (Klurahan, Prokerten, dan Jetis)
4.	Ir. Hermawan Wahyu Wardana Bantul, 19 Januari 1965	Laki-laki	Wilayah III (Puluhan Kidul, Puluhan Lor, dan Puron)
5.	Luluk Nur Aini Bantul, 29 Juli 1998	Perempuan	Wilayah IV (Sawahan dan Pedak)
6.	Drs. Suharyana Bantul, 16 April 1963	Laki-laki	Wilayah V (Gunungsaren Lor dan Gunungsaren Kidul)
7.	Parjiyanto Bantul, 21 Desember 1979	Laki-laki	Wilayah VI (Nengahan dan Lopati)
8.	Waris Sudarminto, S.Pd., M.Pd. Bantul, 02 Agustus 1967	Laki-laki	Wilayah VII (Bendo dan Celan)
9.	Agus Subekti Bantul, 05 Desember 1966	Laki-laki	Wilayah VIII (Mangiran, Cagunan, dan Sapuangin)

B. KALURAHAN PONCOSARI

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Warsinah Bantul, 12 Maret 1966	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Riyadi Bantul, 23 September 1988	Laki-laki	Wilayah I (Singgelo, Talkondo, dan Bayuran)
3.	Very Nugroho Bantul, 17 Februari 1988	Laki-laki	Wilayah II (Godegan dan Polosiyo)
4.	Rohmat Cahya Bantul, 05 Maret 1991	Laki-laki	Wilayah III (Wonotingal, Gunturgeni, dan Besole)
5.	Sarmidi Bantul, 25 September 1972	Laki-laki	Wilayah IV (Sambeng I, Sambeng II, dan Sambeng III)
6.	Sugeng Rahardja, S.Pd. Kulon Progo, 28 Agustus 1960	Laki-laki	Wilayah V (Jragan I, Jragan II, Kukap, dan Koripan)
7.	Anwar Santoso Bantul, 06 Februari 1955	Laki-laki	Wilayah VII (Bibis, Babakan, dan Krajan)
8.	Purwanto Bantul, 16 November 1978	Laki-laki	Wilayah VII (Cangkring, Jopaten, Karang, dan Bodowaluh)
9.	Wagiya Bantul, 10 November 1959	Laki-laki	Wilayah VIII (Ngentak dan Kuwaru)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH